

## **BAB III**

### **BALI DEMOCRACY FORUM**

#### **A. Latar Belakang Bali Democracy Forum**

Pada tahun 2004, setelah menang secara demokratis dalam pemilihan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden RI yang mana merupakan posisi tertinggi dalam setiap proses perumusan kebijakan politik nasional dan internasional. Presiden yang dikenal dengan panggilan SBY ini kemudian melanjutkan masa jabatannya yang kedua dengan memenangkan suara mayoritas pada pemilihan presiden tahun 2009, yang kali ini didampingi Boediono sebagai Wakil Presiden.

Presiden SBY telah melakukan beberapa rangkaian kunjungan kerjasama sejak awal masa pemerintahannya ke luar negeri demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia, diantaranya Australia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Timor Leste. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden SBY masih melanjutkan strategi dasar dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Presiden Megawati. Sejak pemerintahan Orde Baru, Politik Luar Negeri Indonesia menganut Teori Lingkaran Konsentris (*concentric circle formula*) sebagai landasan teori dalam pelaksanaan

Lingkaran konsentris pertama adalah ASEAN yang merupakan “*corner stone*” dari kebijakan luar negeri Indonesia. Di luar lingkaran itu, Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam *Pacific Island Forum*, *The Southwest Dialogue* dan Konsultasi Tripartit antara Indonesia, Australia dan Timor Leste yang mencakup wilayah dalam lingkaran konsentris II, dimana negara-negara ASEAN + 3 (Jepang, China dan Korea Selatan). Selain itu Indonesia juga mengkonsentrasikan kerjasama dengan negara-negara yang ekonominya maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dukungan sepenuhnya akan peran sentral PBB dan prinsip multilateralisme dalam upaya mengatasi perdamaian dan keamanan dunia merupakan aspek penting lainnya dari politik luar negeri Indonesia.

39

Seperti Soeharto, Megawati dalam menata pelaksanaan politik luar negerinya tidak berusaha mencitrakan dirinya sendiri, akan tetapi memberikan peran utama kepada Menteri Luar Negeri. Hal ini berbeda dengan ketiga presiden sebelumnya yaitu Soekarno, BJ Habibie dan Abdurahman Wahid dimana pelaksanaan politik luar negeri lebih mengutamakan peran presiden. Langkah yang dipilih oleh Megawati masih dipertahankan oleh Presiden SBY, tetapi sebagaimana kemunculannya sebagai kandidat presiden yang sukses, SBY berusaha menggunakan kharisma pribadinya dengan mengambil sebagian peran Menlu dalam

---

<sup>39</sup> Ratna Shofi Inayati, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Jurnal Penelitian Politik, LIPU, Vol. 13, No. 1, 2005, hal. 125 (lihat David Easton dan James A. Ray, *What is Politics?*, Edisi Revisi, 1986, hal. 125).

melakukan pendekatan dengan setiap mitra dialog, untuk memperoleh kepercayaan mereka akan keseriusan SBY dalam memenuhi setiap komitmennya.<sup>40</sup>

Presiden SBY telah mempersiapkan secara matang berbagai rencana dan program pemerintahannya, diantaranya adalah kesungguhan dalam berbenah di bidang penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan, termasuk diantaranya yaitu penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai instansi dan lingkungan.

Berbagai tantangan dan problema politik yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks dan majemuk, dan melibatkan lebih banyak aktor, terutama aktor non negara seperti MNC (*Multi National Corporation*) dan NGO (*Non Government Organization*). Seperti misalnya berbagai isu global di bidang ekonomi, politik, keamanan kontemporer, maupun menyangkut non-tradisional seperti terorisme, lingkungan hidup, HAM, demokratisasi, perdagangan narkoba, *human trafficking* / perdagangan manusia, *money laundry* / pencucian uang, konflik SARA, *virtual crime* / kejahatan dunia maya, degradasi lingkungan (penggunaan pemusnah massal, seperti senjata nuklir, biologi dan kimia), dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan di atas, sejak Januari 2002, Kementrian Luar Negeri membuktikan komitmennya dalam membangun struktur kebijakan dan birokrasi baru. Tujuan restrukturisasi ini adalah untuk melibatkan seluruh sektor masyarakat dalam profil diplomatik Indonesia, dimana kebijakan ini

diterapkan melalui forum total diplomacy dimana forum tersebut melibatkan berbagai lapisan, meliputi departemen-departemen terkait, DPR, masyarakat, NGO, dan lain sebagainya.

Salah satu hasil dari restrukturisasi organisasi Kementerian Luar Negeri dalam rangka menyikapi berbagai perkembangan di tingkat nasional dan internasional adalah pembentukan Direktorat Diplomasi Publik pada tahun 2002, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik mengenai kebijakan luar negeri kepada publik di dalam dan di luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya. Sejalan dengan perkembangan, pada tahun 2005 dengan restrukturisasi lanjutan organisasi Kemlu RI, di dalam Direktorat Diplomasi Publik ditambah satu Sub Direktorat, yakni Isu-Isu Aktual dan Strategis.<sup>41</sup>

Desain ini kemudian menjadi semacam landasan baru bagi Indonesia khususnya Departemen Luar Negeri, untuk bertindak lebih koheren dalam urusan-urusan internasional Indonesia. Sedar akan pentingnya posisi Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2004 mengeluarkan sebuah dokumen yang dikenal dengan *The Hassan Initiative*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sekilas Direktorat Diplomasi Publik 2002-2006, Lokakarya Nasional Diplomasi Publik, halaman 2.

<sup>42</sup> Bantarto Bandoro (ed) Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, CSIS, Jakarta, 2005, hal. 42 (lihat Indonesian Diplomats and Diplomacy in the Twenty First Century. In Pursuit of Excellence. The Hassan Initiative adalah sebuah konsep kasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 2004 sebagai refleksi konkret dari Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas diplomat dan diplomasi Indonesia).

Konsep ini ditafsirkan sebagai salah satu panduan dan dasar dalam membentuk profil diplomat dan diplomasi internasional Indonesia yang handal di abad 21, dimana perubahan pada tatanan nasional merupakan suatu keharusan menyesuaikan diri dengan situasi global. Globalisasi tidak hanya menyatukan berbagai unit politik yang beragam ke dalam kerangka ekonomi global, tetapi juga melemahkan batasan antara wilayah (*spheres*) publik dan privat.

Kementrian Luar Negeri mengadakan berbagai program baru, yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Salah satunya adalah event tahunan, Bali Democracy Forum yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008, di bawah naungan Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jendral Informasi dan Media, Kementrian Luar Negeri.

Bali Democracy Forum merupakan sebuah forum yang membicarakan mengenai demokrasi, yang pertama kali diadakan di kawasan Asia. Maka dari itu, inisiatif penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* merupakan sebuah *inspirasi yang fenomenal* dalam strategi dan misi diplomasi Indonesia, hal ini khususnya dalam mendorong pengembangan serta mempromosikan demokrasi di kawasan Asia. Di samping itu, forum ini juga merupakan momentum bersejarah dimana perwakilan negara-negara Asia berbicara tentang demokrasi yang sebelumnya masih menjadi isu yang cukup sensitif di kawasan Asia.

Bali, yang dikenal sebagai Pulau Dewata (*Paradise Island*) kini tidak hanya dikenal luas sebagai tempat pariwisata dan tradisi budaya yang sangat menarik, akan tetapi kini juga menjadi tempat bagi *inspirasi demokrasi* melalui pelaksanaan

*Bali Democracy Forum* yang merupakan agenda tahunan pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan *inisiatif yang fenomenal* dalam kerjasama kawasan melalui pertukaran pengalaman dan *best practices* untuk mendorong kuatnya demokrasi yang tidak dipaksakan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kekuatan dan kemampuan dari dalam. Selain itu juga inisiatif ini akan memberikan inspirasi dan momentum bagi pengembangan demokrasi di dalam negeri.

Bali Democracy Forum ini tidak hanya berpusat pada salah satu sistem politik tertentu akan tetapi pada semua sistem politik yang mempunyai kemauan untuk mengembangkan demokrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan, setiap negara dengan sistem politik apapun yang memiliki keinginan dalam hal pengembangan demokrasi dapat turut berperan serta dalam forum ini, untuk memberikan kontribusinya dalam pengembangan demokrasi.<sup>43</sup>

## **B. Visi dan Misi**

Saat mendengar kata Demokrasi, tentulah kata tersebut bukan termasuk kata yang jarang kita dengar. Demokrasi merupakan sebuah kata yang selalu diidentikkan dengan sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat ini mempunyai berbagai varian dalam perkembangannya. Negara-negara yang menganut sistem ini pun memiliki perbedaan paradigma mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi yang tepat, dimana hal ini memiliki hubungan yang erat

<sup>43</sup>[http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3138&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3138&option=com_content&task=view), yang diakses pada hari Senin, 1 November 2010

dengan jenis sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara. Sehingga perkembangan sistem demokrasi ini juga tidak sama antara tiap – tiap negara penganut sistem demokrasi ini.

Sementara itu Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa demokrasi sendiri tidak cukup membawa kemajuan kehidupan suatu bangsa melainkan harus mencakup faktor-faktor lain seperti aturan hukum dan kerja keras agar suatu negara bisa mencapai kemajuan. Demokrasi tidak memiliki satu model saja, akan tetapi memiliki banyak varian, tetapi yang jelas ada universal values dan spirit dari demokrasi itu sendiri. Karena itu, lanjut dia, forum seperti BDF untuk berdialog dan berbagi pengalaman dalam berdemokrasi amat penting guna memperkaya pengetahuan negara-negara kawasan Asia.<sup>44</sup>

Indonesia juga termasuk dalam golongan negara yang menganut Sistem Demokrasi Terbesar Ketiga di Dunia. Indonesia digolongkan dalam negara penganut sistem demokrasi setelah melalui sebuah proses reformasi politik. Pada peringkat pertama dan kedua, masing-masing ditempati oleh India dan Amerika Serikat.

BDF terinspirasi oleh *Davos Economic Forum* yang dinilai berhasil dalam menyelenggarakan pertemuan tahunan yang membicarakan mengenai berbagai isu ekonomi. Forum ini merupakan forum tahunan tingkat menteri dan tokoh berpengaruh yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama dalam bidang

capacity building untuk negara-negara demokratis dan negara-negara yang *aspiring to be more democratic*. Sasaran dari penyelenggaraan BDF adalah untuk menjalin kerjasama regional yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan berbagi pengalaman; untuk menginisiasi proses belajar dan berbagi antar negara di Asia sebagai suatu strategi menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan dan di luar kawasan; untuk membangun institusi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian dan pusat pembelajaran; serta wadah para ahli dalam berbagai hal yang berhubungan dengan isu demokrasi. BDF tidak saja sebagai pertemuan tahunan biasa, karena selain itu BDF juga secara berkesinambungan akan menyelenggarakan pelatihan/*workshop*, seminar, *roundtable discussion*, dan lain sebagainya, untuk membahas berbagai isu yang berhubungan dengan demokrasi seperti pemilu, sistem multi partai dalam masyarakat yang pluralistis dan toleran. parlemen yang efektif sistem peradilan yang independen, penegakan hukum, perlindungan dan penegakan HAM, good governance, pembentukan pers yang aktif, pemanfaatan ekonomi persaingan terbuka, pembentukan masyarakat sipil yang dinamis serta keterlibatan militer dalam masyarakat yang demokratis dan banyak isu lainnya.<sup>45</sup>

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan prakarsa Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan Asia. Forum ini tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara

<sup>45</sup>[http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?time=news\\_cony&id=5387](http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?time=news_cony&id=5387) yang



di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.<sup>46</sup>

Para delegasi dari berbagai negara yang hadir ini tidak saja membahas, namun juga saling bertukar pendapat maupun pengalaman mereka mengenai perkembangan demokrasi yang dialami di masing - masing negara peserta. Acara Bali Democracy Forum (BDF) ini tidak hanya bersifat eksklusif antarnegara penganut sistem demokrasi, akan tetapi lebih merupakan sebuah forum yang bersifat inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk dapat berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.<sup>47</sup> Bali Democracy Forum merupakan sebuah bentuk inisiatif pemerintah Indonesia sebagai wujud kontribusi dalam upaya mengembangkan dan mempromosikan demokrasi.<sup>48</sup>

Forum tersebut bertujuan mendorong kerja sama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan Asia dengan cara berbagi pengalaman, dialog, dan kerja sama praktis dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan politik.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup><http://www.antaranews.com/view/?i=1226239596&c=INT&s=>, yang diakses pada hari Senin, tanggal 1 November 2010

<sup>47</sup>[http://balidemocracyforum.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=127:empat-&catid=45:news-on-bdf&Itemid=128](http://balidemocracyforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127:empat-&catid=45:news-on-bdf&Itemid=128), yang diakses pada hari Senin, tanggal 1 November 2010

<sup>48</sup><http://www.detiknews.com/read/2009/06/08/120707/1144019/10/dirjen-idp-deplu-jelaskan-hasil-bali-democracy-forum>, yang diakses pada hari Senin, tanggal 1 November 2010

<sup>49</sup><http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/12/10/brk.20091210.212901.id.html>, yang

### C. Bali Democracy Forum I, II dan III

Pada bagian ini akan dibicarakan lebih lanjut mengenai Bali Democracy Forum, seperti misalnya tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, negara - negara peserta dan observer forum, tema atau isu populer yang dibahas, dan lain sebagainya.

- Bali Democracy Forum I

Untuk pertama kalinya event demokrasi ini diselenggarakan, Bali Democracy Forum I, yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 10 – 11 Desember 2008. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah mengenai, “*Building Consolidating Democracy : a strategic Agenda for Asia*”.

Event kali ini dihadiri oleh sebanyak 23 negara peserta, yang antara lain berasal dari kalangan akademisi, praktisi serta dari kalangan pejabat senior dalam pemerintahan. Negara-negara di kawasan ASEAN secara keseluruhan, mengirimkan para perwakilannya dalam event tersebut. Negara-negara peserta tersebut antara lain adalah : Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Japan, Sri Lanka, Malaysia, Philippines, Singapore, Bangladesh, Chinese People’s Republic, Vietnam, New Zealand, Qatar, Republic of Korea, Lao PDR, Thailand, Mongolia, India, Afghanistan, Pakistan, Azerbaizan. Sedangkan beberapa negara yang berada di luar kawasan Asia yang diundang sebagai pihak peninjau (observer) dalam event ini antara lain adalah Amerika Serikat, Austria, Belanda, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Swiss, Swedia dan Tunisia.<sup>50</sup>

<sup>50</sup>[http://www.setec.go.id/index.php?Itemid=20&id=3128&option=com\\_content&task=view](http://www.setec.go.id/index.php?Itemid=20&id=3128&option=com_content&task=view)

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, membuka secara resmi pertemuan *Expert Group Preparatory Meeting* (EGPM) yang juga berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 9 November 2008. EGPM merupakan langkah pendahuluan dan persiapan Bali Democracy Forum.

Forum ini membahas antara lain mengenai berbagai permasalahan seperti misalnya pemerintahan yang bersih, pemilihan umum, peran parlemen yang dinilai efektif, peran pihak militer yang dinilai profesional, civil society serta berbagai peran media dalam sistem demokrasi.<sup>51</sup>

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, sekaligus penggagas BDF, Hassan Wirajuda, mengemukakan bahwa dalam rangka mewujudkan sebuah sistem demokrasi yang lebih baik demi generasi mendatang, harus terdapat dialog yang komprehensif antar negara serta juga antar masyarakat mengenai demokrasi. Untuk kedepannya, BDF diharapkan akan mampu untuk mewujudkan demokrasi yang ideal bagi negara-negara di kawasan Asia.

- Bali Democracy Forum II

Event Bali Democracy Forum II berlangsung pada 10-11 Desember 2009 dengan bertempat di Nusa Dua, Bali. Pada kesempatan ini, tema yang dibahas pada kesempatan ini adalah "*Promoting Synergi between Democracy and Development in Asia: Prospects for Regional Cooperation*".

---

<sup>51</sup> <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=62229&i=5&qr=>, "Bali Democracy Forum 2008: Demokrasi Lokal dan Nasional Bertumbuh" yang dihosting pada hari Jumat

Banyaknya jumlah negara yang ikut berpartisipasi dalam event Bali Democracy Forum mengalami peningkatan. Pada event sebelumnya, Bali Democracy I, terdapat sebanyak 31 negara peserta, sedangkan pada event Bali Democracy Forum II terdapat 36 negara peserta dan 13 pihak observer. Para Negara peserta pada BDF II tersebut adalah Indonesia, Japan, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, Malaysia, Maldives, Portugal, New Zealand, Tajkistan, China, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Vietnam, Iraq, Kyrgystan, Mongolia, Nepal, Qatar, Thailand, Afghanistan, India, Republic of Korea, Pakistan, Ppua New Guinea, Philippines, Kazakhstan.

Presiden Susilo Bambang Hudoyono pada pidato pembukaan acara kali ini menyampaikan bahwa, esensi dari demokrasi dan pembangunan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik itu sebagai hamba Tuhan, maupun sebagai insan sosial.

- Bali Democracy Forum III

Untuk yang ketiga kalinya, event yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada 9 - 10 Desember 2010 ini dihadiri oleh sebanyak 44 wakil dari negara peserta, sebanyak 24 perwakilan dari negara Observer, dan juga wakil dari 3 Organisasi Internasional. Pada kesempatan kali ini, diselenggarakan dua sesi interaktif mengenai dua topik besar yang menjadi pembahasan forum. Sesi pertama adalah "*How a Democratic System Helps Prevent the Occurrence and Escalation of Violent Conflict*" (Bagaimana sistem demokrasi dapat

membantu untuk mencegah adanya dan peningkatan konflik) yang dipimpin langsung oleh Mantan Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirajuda. Sedangkan pada sesi kedua membahas mengenai *"Why Democracy and Economic Development are Essential to Peace Building"* (bagaimana peningkatan demokrasi dan ekonomi menjadi bagian penting bagi pembangunan perdamaian) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar.<sup>52</sup>

Dalam BDF III juga terdapat agenda acara yang memutuskan rencana pertemuan BDF IV pada tahun 2011 dan pertemuan BDF Summit tahun 2012, yang juga akan merupakan pertemuan BDF V. Acara ini berlangsung dengan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak sebagai Co-Chair Bali Democracy Forum II.

#### **D. Institute for Peace and Democracy**

Lembaga ini, Institute for Peace and Democracy (IPD) dibentuk khusus untuk mengelola kegiatan Bali Democracy Forum. IPD bertempat di kampus Universitas Udayana, Bali. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Departemen Luar Negeri RI dengan Universitas Udayana mengenai pembentukan IPD dilakukan pada pembukaan BDF I di Nusa

---

<sup>52</sup> [http://kominfonewscenter.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=912:chair-statement-bali-democracy-forum-%amp;catid=27:luar-negeri%&Itemid=2](http://kominfonewscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=912:chair-statement-bali-democracy-forum-%amp;catid=27:luar-negeri%&Itemid=2), yang diakses pada

Dua, Bali dan dilaksanakan secara langsung oleh Menlu Hassan Wirajuda dan Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Made Bakta.<sup>53</sup>

Lembaga yang bersifat non-profit dan independen ini akan menangani berbagai kegiatan, seperti :

1. *Intellectual Exchanges*
2. *Training for Practitioners*
3. *Joint Missions*
4. *Maintenance of Collections and Publishing of Works*
5. *Network Building*
6. *Capacity Building for the University of Udayana*

*Institute for Peace and Democracy* ini merupakan *Implementing Agency* dari Bali Democracy Forum. Penyelenggaraan Bali Democracy Forum dan pembentukan *Institute for Peace and Democracy (IPD)* telah memberikan leverage baru bagi bangsa Indonesia.

#### **E. Perkembangan Bali Democracy Forum**

Pada tahun 2011, Indonesia berkesempatan menjadi ketua organisasi negara-negara di wilayah asia tenggara, ASEAN. Dalam rangka hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menitikberatkan kepada 3 hal yang dinilai sangat krusial. Ketiga hal tersebut adalah :

- a. Memajukan upaya pencapaian Komunitas ASEAN.

---

<sup>53</sup> <http://www.antaraneews.com/view/?i=1226239596&c=INT&s=>, yang diakses pada hari Senin, 1 November 2010

- b. Memelihara tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- c. Ketiga, membahas perlunya visi ASEAN pasca 2015 yang bertumpu pada peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia.

Dari ketiga prioritas itu jelas bahwa Indonesia perlu mendorong agar ASEAN berkembang sebagai organisasi yang bersifat *people-centered*.

Dalam usaha mewujudkan 3 hal seperti yang telah diungkapkan di atas, Indonesia telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan banyak pihak. Sebagai contohnya adalah pelaksanaan event *Bali Democracy Forum (BDF) III* yang dilaksanakan di Bali pada 9-10 Desember 2010 dan kerjasama pemberantasan kejahatan terorisme.

Pelaksanaan BDF semakin berkembang dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan BDF ini terutama semakin berkembang dari segi substansi. Saat pertama kali event ini diselenggarakan pada tahun 2008, berbagai substansi yang terdapat dalam BDF I ini masih bersifat sangat umum. Kemudian pada tahun kedua event ini diadakan, yaitu tahun 2009, hal-hal yang dibahas berkaitan dengan berbagai masalah pembangunan. Sedangkan pada tahun ketiga, 2010, berhubungan dengan masalah mengenai pencegahan konflik. Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Marty Natalegawa, menyebutkan bahwa berbagai perkembangan dalam BDF tersebut telah

memperlihatkan betapa *Bali Democracy Forum* sudah menjadi bagian yang semakin penting dari arsitektur kawasan (*Regional Architecture*).”<sup>54</sup>

Pada BDF III juga terdapat agenda acara yang memutuskan rencana pertemuan BDF IV pada tahun 2011 dan pertemuan BDF Summit tahun 2012, yang juga akan merupakan pertemuan BDF V. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimis forum demokrasi satu-satunya yang diadakan di Asia ini akan semakin berkembang dan menjadi ikon bagi dialog antar bangsa untuk dapat mengembangkan nilai dan praktek demokrasi.

#### **F. Tanggapan dari Negara-Negara Lain Mengenai Penyelenggaraan event Bali Democracy Forum**

Setelah tiga tahun berturut-turut meraih kesuksesan dalam menggelar forum diskusi mengenai demokrasi yang pertama kali diadakan di Asia ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin bersikap optimis bahwa event ini akan semakin berkembang dan akan dapat menjadi ikon bagi dialog antar bangsa untuk mengembangkan berbagai nilai dan praktek demokrasi. Sementara itu, Presiden juga mengemukakan harapannya akan jumlah peserta yang semakin bertambah dapat memperoleh manfaat yang nyata dari penyelenggaraan BDF yang digagas di masa pemerintahannya tersebut. Sangat jelas bahwa event BDF ini tidak dirancang sebagai



forum yang berfungsi untuk mendikte atau bahkan memberikan suatu penilaian pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Forum ini dinilai sukses, karena dari tahun ke tahun, para peserta forum ini semakin bertambah. Pada BDF I, yang berlangsung pada 10-11 Desember 2008, dengan tema "*Building Consolidating Democracy : A Strategic Agenda for Asia*" dihadiri oleh 31 negara peserta dan peninjau. Sedangkan pada event BDF II dihadiri oleh 35 negara dan 13 organisasi peninjau. Jumlah ini semakin mengalami peningkatan pada event BDF III yang dihadiri oleh 42 negara peserta dan 29 organisasi peninjau.

Sikap optimis seperti ini tak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia saja, melainkan juga dirasakan oleh para tokoh penting dari berbagai negara yang juga mengakui kesuksesan BDF. Sejumlah kepala negara dari berbagai belahan dunia menyampaikan apresiasi pada penyelenggaraan event tahun ini. Indonesia dianggap sebagai negara yang telah sukses menjadi sebuah negara yang mampu menerapkan prinsip demokrasi sekaligus menghadirkan stabilitas dan keamanan pada saat bersamaan di kawasannya.

Selain itu, Indonesia juga dinilai telah sukses dalam penerapan prinsip – prinsip demokrasi dalam sebuah masyarakat dengan latar belakang beragam sekaligus juga mampu menyandingkan nilai-nilai agama Islam, sebagai ajaran agama yang mayoritas dianut penduduknya, dengan nilai dan prinsip demokrasi tadi. Pujian itu dilontarkan sejumlah pemimpin dan ketua delegasi perwakilan negara dalam pidato sambutan mereka di pembukaan Bali Democracy Forum (BDF)

III, Kamis (9/12). Beberapa pemimpin negara itu, seperti Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd, dan Menteri Luar Negeri Nepal Sujata Koirala.<sup>55</sup>

Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak, mengakui signifikansi BDF untuk perkembangan kehidupan demokrasi di kawasan Asia. Hal ini beliau sampaikan setelah menghadiri dan bertindak sebagai co-chair dalam forum tersebut. Lee Myung Bak berharap, negara-negara lain di Asia akan mendapatkan komunikasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki dalam rangka untuk memajukan demokrasi. Presiden Korea Selatan ini juga memuji kemajuan kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga dinilai tepat untuk menjadi penyelenggara BDF. Sementara itu, Menteri Luar Negeri India Sri-mari Preneet Kaur mengatakan bahwa BDF telah menjadi suatu forum rutin di kalender negara-negara demokrasi di Asia dan di penjuru dunia.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Manoucher Mottaki mengungkapkan bahwa ia menyambut baik atas inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan BDF sebagai ajang dialog demokrasi.

Sementara itu Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa demokrasi sendiri tidak cukup membawa kemajuan kehidupan suatu bangsa melainkan harus mencakup faktor-faktor lain seperti aturan hukum dan kerja keras agar suatu negara bisa mencapai kemajuan. Demokrasi tidak memiliki satu model saja, akan tetapi

---

<sup>55</sup> <https://politikinternational.wordpress.com/category/indonesia-asing/page/2/> yang diakses pada hari Jumat, 14 Oktober 2011

memiliki banyak varian, tetapi yang jelas ada universal values dan spirit dari demokrasi itu sendiri. Karena itu, lanjut dia, forum seperti BDF untuk berdialog dan berbagi pengalaman dalam berdemokrasi amat penting guna memperkaya pengetahuan negara-negara kawasan Asia.<sup>56</sup>

Disamping itu, berbagai bentuk tawaran bantuan itu cukup banyak, terutama dari negara-negara maju. Tetapi itu kembali kepada diri kita sendiri, sebab bagaimanapun BDF ini adalah forum bagi negara-negara di Asia, dan kita ingin agar negara-negara di kawasan ini untuk lebih berperan.

Dalam hal ini, pada BDF II yang berlangsung pada 10 – 11 Desember 2009 lalu, Kuwait telah menyampaikan pada pemerintah Indonesia bahwa mereka akan membantu mensukseskan pelaksanaan Bali Democracy Forum. Hal tersebut dinilai wajar, karena Kuwait termasuk dalam salah satu negara yang terletak di kawasan Asia dan mereka telah melihat bahwa BDF ini sangat bermanfaat.

Banyaknya jumlah negara participant dan observer yang hadir, juga cukup memberikan kejutan bagi Indonesia, yang kalau dinilai secara politis, nilai kehadirannya itu cukup tinggi. Hal tersebut memperlihatkan, bahwa BDF telah dapat diterima oleh banyak negara, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Asia akan tetapi juga bagi negara-negara di kawasan lainnya.

Hal ini pasti terkait dengan keberhasilan Indonesia selama ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, dan masyarakat internasional juga dapat melihat bagaimana

<sup>56</sup><http://batavia.go.id/node/402230>, yang diakses pada hari Jumat, 14 Oktober 2010

Indonesia bisa mereformasi demokrasi, melakukan perubahan dalam masyarakat, dengan waktu yang sedemikian cepat, yaitu hanya dalam waktu 10 tahun. Biasanya kita berpendapat, bahwa sebuah perubahan masyarakat itu paling tidak membutuhkan satu generasi, tetapi Indonesia hanya membutuhkan waktu 10 tahun dan tanpa mengganggu integritas wilayah Negara Indonesia, itu faktor pertama. Faktor kedua, bahwa sebagai negara yang sudah demokratis, kita tidak mengatakan bahwa negara-negara lain harus mengikuti Indonesia, tetapi kita ingin berbagi dengan mereka.

#### **G. Keikutsertaan Myanmar dalam event Bali Democracy Forum**

Pada BDF II, Myanmar mengirimkan seorang pejabat setingkat menteri, hal ini menunjukkan bahwa confidence orang lain terhadap Indonesia sudah semakin tumbuh. Mereka sudah melihat bahwa forum ini bukan untuk menggurui ataupun mengubah mereka untuk menjadi apa, tetapi ini benar-benar sebuah forum untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari Myanmar dan juga sebaliknya apa yang bisa dipelajari Myanmar dari Indonesia. Sekarang ini sudah ada beberapa negara youngest democracy seperti Nepal, Bhutan, Afghanistan dan lain-lainnya, yang meminta Indonesia untuk membantu memberikan pelatihan kepada KPU ataupun political practice mereka.<sup>57</sup>

Di kawasan Asia, telah mulai terlihat akan adanya keterbukaan terhadap sistem demokrasi. Akan tetapi Asia tampaknya masih enggan atau sungkan untuk dapat mengembangkan isu pengembangan demokrasi dalam agenda wacana regional. Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesia telah cukup lama memikirkan cara untuk menjadikan demokrasi sebagai salah satu agenda dalam wacana regional Asia. Mantan Menlu RI, Hassan Wirajuda, memaparkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah berhasil melakukan transformasi dari suatu pemerintahan yang didominasi militer ke suatu pemerintahan *full-pledged democracy*. Indonesia bangga dengan capaiannya tersebut, namun pada saat yang sama Indonesia juga menyadari adanya kebutuhan untuk mengkonsolidasi capaian demokrasi tersebut. Indonesia memandang penting upaya untuk membuat demokrasi mengakar di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Indonesia mengambil pendekatan membuka diri untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain di Asia dalam hal demokrasi serta sebaliknya Indonesia juga membagi pengalaman. Komitmen saling belajar tersebut telah diterjemahkan antara lain dalam hubungan Indonesia dengan Myanmar. Dalam berbagai pendekatan pribadi Presiden RI kepada Jenderal Than Swei melalui surat, disampaikan pengalaman Indonesia yang meski melalui berbagai kesulitan berhasil beralih dari pemerintahan yang didominasi militer menjadi pemerintahan demokratis. Indonesia menawarkan untuk berbagi pengalaman tersebut karena Indonesia dan Myanmar pernah mengalami situasi yang sama